

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG DESA WISATA DI DESA SOMONGARI

Tesar Afianggit¹ dan Mutiar Fitri Dewi²

¹Setda Kabupaten Boyolali, Jl. Merdeka Barat, Kemiri, Boyolali

²Fakultas Politik Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl. Ir. Soekarno, KM. 20
Jatinangor, 45363

E-mail: tesara0709@gmail.com, mutiar19@ipdn.ac.id

ABSTRAK. Sebagai salah satu sektor unggulan, pariwisata perlu dikembangkan dengan serius supaya dapat berkontribusi nyata pada pendapatan negara dan daerah yang pada akhirnya dapat membantu menyejahterakan masyarakat. Tren saat ini yaitu pengembangan desa wisata yang banyak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia termasuk di Desa Somongari Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Desa Wisata serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat serta upaya dalam mengatasi hambatan implementasi. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan yaitu teori implementasi dari Van Meter & Van Horn (1975). Data dikumpulkan melalui *in-depth interview*, observasi, dan dokumentasi. Setelah dikumpulkan, data kemudian dianalisis dengan model analisis interaktif Miles, Huberman, Saldana (2014). Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan telah berjalan dengan baik yang ditunjukkan dengan empat dari enam dimensi yang dianalisis sudah dikategorikan baik, yaitu dimensi karakteristik organisasi pelaksana, dimensi komunikasi antarorganisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana, dimensi sikap pelaksana, dan dimensi kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Keberhasilan ini didukung oleh adanya komitmen yang baik antarpelaksana kebijakan, komunikasi yang efektif, dan tingginya kesadaran masyarakat Desa Somongari terkait pengembangan desa wisata. Adapun yang menjadi faktor penghambat yaitu kurangnya pemahaman pelaksana kebijakan terhadap Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Desa Wisata, sumber daya Pokdarwis yang belum memadai dan kompeten, serta pengelolaan dana desa yang belum optimal dan minimnya dukungan anggaran untuk pembangunan fasilitas penunjang.

Kata kunci: implementasi; kebijakan; pengembangan; pemerintah; desa wisata

IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 15 OF 2019 ABOUT THE TOURISM VILLAGE IN SOMONGARI VILLAGE

ABSTRACT. As one of the leading sectors, tourism needs to be developed purposefully in order it can contribute significantly to national and regional income which in the end can improve the society welfare. The current trend is the development of tourist villages which is being carried out in various regions in Indonesia, including Somongari Village, Kaligesing District, Purworejo Regency, Central Java. In this research, researchers describe the implementation of Regional Regulation Number 15 of 2019 concerning Tourism Villages and identify supporting and inhibiting factors and efforts to overcome obstacles to implementation. This research is qualitative research with a descriptive approach. The theory used is the implementation theory from Van Meter & Van Horn (1975). Data was collected through *in-depth interviews*, observation, and documentation. Once collected, the data was then analysed using the interactive analysis model Miles, Huberman, Saldana (2014). The research results indicate that the policy implementation has been successful, as evidenced by four out of six analyzed dimensions being categorized as good, namely the dimension of the characteristics of the implementing organization, the dimension of communication between related organizations and implementing activities, the dimension of the attitudes of the implementers, and the dimension of the social, economic, and political environmental conditions. This success is supported by the strong commitment among policy implementers, effective communication, and the high awareness of the Somongari Village community regarding the development of the tourist village. The inhibiting factors include the lack of understanding among policy implementers regarding Regional Regulation Number 15 of 2019 on Tourist Villages, the inadequate and incompetent resources of Pokdarwis, the suboptimal management of village funds, and the minimal budget support for the development of supporting facilities.

Key words: implementation; policy; development; government; tourist village

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki potensi wisata yang beragam yang dapat menarik minat kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan penyokong perekonomian Indonesia (Santoso dkk., 2023).

Potensi dari sektor pariwisata ini telah menyumbang devisa yang cukup besar untuk Indonesia karena sektor ini dapat dimaksimalkan untuk menopang devisa negara (Anandhyta & Kinseng, 2020). BPS mencatat pada tahun 2022 jumlah devisa dari sektor pariwisata yaitu US\$ 7,03 (BPS, 2024). Sektor pariwisata juga dapat meratakan dan meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan (Mebri dkk., 2022). Hal ini berimplikasi bahwa jika sektor pariwisata ini dikembangkan dengan baik, maka dapat menjadi salah satu sumber pendapatan negara dan pendapatan daerah (Kristian, 2021) yang menjanjikan yang nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Tren pariwisata di Indonesia saat ini telah mengalami perubahan yaitu dari wisata massal berubah menjadi wisata alternatif. Wisata alternatif (*alternative tourism*) merupakan wisata yang mengusung konsep terkait alam, budaya lokal, dan keunikan sebuah daerah (Wirdayanti dkk., 2021). Tipe wisata ini biasanya berkonsepkan alam dengan melibatkan masyarakat setempat; contoh wisata ini yaitu agro wisata, ekowisata, petualangan, dan lain-lain (Krisnawati, 2021).

Salah satu jenis wisata alternatif yang saat ini sedang naik daun yaitu desa wisata. Sugianto (2016) sebagaimana dikutip dalam (Hilman & Putri, 2022) mendefinisikan desa wisata sebagai penggabungan antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung lainnya yang disajikan dalam struktur kehidupan sosial masyarakat dan menyatu dengan tradisi maupun adat istiadat yang berlaku di masyarakat tersebut. Tujuan penggabungan atraksi, akomodasi, dan berbagai fasilitas lainnya yaitu untuk meningkatkan minat dan lama kunjungan wisatawan, serta memperkenalkan budaya desa secara intensif dengan melibatkan langsung wisatawan di desa wisata tersebut (Ira & Muhamad, 2020).

Saat ini berbagai daerah di Indonesia mulai mengembangkan tren wisata ini. Salah satunya Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Di Kabupaten Purworejo, tepatnya di Desa Somongari Kecamatan Kaligesing, terdapat beberapa potensi wisata, mulai dari wisata sejarah yaitu Memorial House of W.R. Soepratman, wisata budaya Festival Jolenan Somongari, agrowisata buah durian dan manggis, hingga wisata alam Curug Silangit.

Potensi-potensi wisata yang ada di Desa Somongari ini berdasarkan data kunjungan wisatawan ke Desa Somongari tahun 2018-2022 yang berhasil peneliti kumpulkan menunjukkan tren penurunan terutama pada masa COVID-19. Penurunan secara signifikan terjadi pada tahun 2020 yang mana kunjungan wisatawan sejumlah 808 wisatawan jika dibandingkan tahun 2019 dengan jumlah wisatawan sejumlah 6.601. Hal ini diakibatkan adanya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Setelah diberlakukannya *new normal* atau adaptasi kebiasaan baru pada tahun 2022, kunjungan wisatawan sudah mulai terjadi peningkatan sejumlah 575 wisatawan.

Selain karena faktor pandemi COVID-19, penurunan jumlah kunjungan wisatawan juga dipicu dari adanya berbagai permasalahan. Sesuai informasi yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DINPORAPAR) terdapat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan rendahnya jumlah kunjungan wisatawan di Desa Somongari yaitu promosi wisata yang masih kurang gencar dan meluas, kompetensi pengelola desa wisata yang masih rendah, fasilitas/infrastruktur yang belum memadai dan penataan kawasan desa wisata yang belum optimal.

Hal ini didukung oleh penjelasan dari Kepala Desa Somongari bahwa belum adanya fasilitas umum maupun mushola dan toilet umum dalam *Memorial House W.R. Soepratman* serta masih sering bergonta-gantinya pengurus Desa Wisata Somongari.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pemerintah daerah melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DINPORAPAR) Kabupaten Purworejo sudah melakukan beberapa upaya diantaranya mengadakan pelatihan untuk pengelola Desa Wisata Somongari, melakukan promosi berbagai pariwisata yang ada di Kabupaten Purworejo melalui akun media sosial *Tourist Information Center (TIC)* Purworejo. Di sisi lain, Pemerintah Desa Somongari juga melakukan upaya dengan membangun jalan poros desa menuju Curug Silangit dan membangun beberapa fasilitas umum serta mushola pada destinasi wisata Curug Silangit. Namun, beberapa upaya yang dilakukan oleh DINPORAPAR maupun pemerintah Desa Somongari belum berjalan dan belum dikelola secara optimal oleh masyarakat. Pengembangan Desa Wisata Somongari belum optimal sehingga kunjungan wisatawan belum maksimal dan kalah bersaing dengan daerah lain di sekitar Kabupaten Purworejo.

Hasil penelitian terdahulu yang relevan menunjukkan bahwa belum optimalnya implementasi kebijakan destinasi wisata di berbagai daerah dipicu oleh berbagai faktor seperti adanya kepentingan masyarakat, belum optimalnya upaya yang dilakukan sehingga belum mencapai target, kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, minimnya partisipasi investor dan infrastruktur, keterbatasan anggaran, dan dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 (Gartiwi dkk., 2022; Maulidiah & Megawati, 2022) Lebih lanjut hasil penelitian (Mellu dkk., 2018) menemukan bahwa yang

menjadi faktor penghambat dalam pengembangan desa tujuan wisata yaitu aspek sarana dan prasarana, lingkungan budaya masyarakat, kelembagaan, pengelolaan, aspek pengusaha, serta aspek penelitian dan pengembangan.

Berbagai permasalahan yang ditemukan dari hasil penelitian terdahulu menarik untuk diteliti secara mendalam terlebih lagi jika melihat potensi wisata Desa Somongari yang cukup menjanjikan. Peneliti optimis jika dikemas dan dikelola dengan baik, Desa Wisata Somongari akan menjadi wisata unggulan serta dapat menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait kebijakan pengembangan desa wisata Somongari. Adapun tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui dan mendeskripsikan kebijakan pengembangan desa wisata Somongari beserta faktor pendukung dan penghambat dan upaya dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan tersebut.

KERANGKA PEMIKIRAN

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konsep implementasi kebijakan publik dari Van Meter dan Van Horn (1975) (Agustino, 2017). Terdapat enam dimensi dalam teori tersebut yang akan digunakan sebagai pisau analisis. Keenam dimensi tersebut yaitu:

1. **Standar dan Sasaran Kebijakan**, untuk melihat apakah kebijakan mudah dipahami oleh semua orang. Dalam penelitian ini, dimensi ini digunakan untuk melihat apakah penetapan standar dan sasaran kebijakan berupa Perda Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Desa Wisata telah dipahami pada aspek peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian dan pendayagunaan potensi alam, aspek jaminan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal, serta aspek peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.
Standar dan sasaran kebijakan dikatakan berhasil jika memenuhi tiga indikator, yaitu:
 - a. Adanya pemahaman pihak pelaksana terhadap standar dan sasaran kebijakan terkait pelaksanaan pengembangan desa wisata menurut Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2019 tentang Desa Wisata.
 - b. Adanya kesesuaian program terhadap standar dan sasaran kebijakan yang tercantum dalam aturan teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2019 tentang Desa Wisata.
 - c. Tercapainya tujuan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Desa Wisata.
2. **Sumber Daya**, untuk mengidentifikasi kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan Desa Wisata Somongari yang ditentukan dengan ada atau tidaknya kemampuan, keinginan, dan sikap positif dari SDM terkait. Selain SDM, dimensi ini juga digunakan untuk melihat dukungan sumber daya finansial terhadap implementasi kebijakan.
Dari daftar nominatif PNS di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo tahun 2024 terdapat 45 PNS yang menjadi implementor Perda Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2019 tentang Desa Wisata. Dari sisi tingkat pendidikan, para ASN itu ada yang sudah menyelesaikan S2 (7 orang), S1 (7 orang), DIII (10 orang), DII (1 orang), SMA (15 orang), SMP (3 orang), dan SD (2 orang).
Dimensi Sumber Daya dapat dikatakan berhasil jika memenuhi dua indikator yaitu:
 - a. Kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo dan pengelola Desa Wisata Somongari.
 - b. Sumber daya finansial (anggaran) yang dimiliki Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo, Kecamatan Kaligesing dan Desa Somongari dalam mendukung pelaksanaan pengembangan Desa Wisata Somongari sesuai Peraturan Daerah No 15 Tahun 2019 tentang Desa Wisata.
3. **Karakteristik Organisasi Pelaksana**, dimensi ini digunakan untuk mengidentifikasi karakter agen pelaksana, mulai dari struktur birokrasi, norma dan aturan, serta pola hubungan dalam birokrasi.
Indikator keberhasilan dimensi ini yaitu:
 - a. Adanya penyusunan program kerja organisasi.
 - b. Keterlibatan organisasi terkait dalam pelaksanaan program pengembangan Desa Wisata Somongari.
4. **Komunikasi Antarorganisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana**, dalam penelitian yang dilakukan, dimensi ini digunakan untuk melihat bagaimana komunikasi yang dilakukan antarstakeholder terkait, yakni Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, pemerintah Kecamatan Kaligesing, pemerintah Desa Somongari, masyarakat, dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

Dimensi ini dikatakan berhasil jika:

- a. Adanya koordinasi antar pihak pelaksana khususnya dengan pengelola (Pokdarwis Desa Wisata Somongari).
 - b. Adanya mekanisme koordinasi yang jelas dalam proses pengembangan Desa Wisata Somongari.
5. **Sikap Para Pelaksana (*Implementor*)**, dalam dimensi ini diidentifikasi tiga sikap yaitu: a) respons pelaksana terhadap kebijakan pengembangan Desa Wisata Somongari; b) kemampuan kognisi atau pemahaman para pelaksana kebijakan terhadap standar dan sasaran program kebijakan pengembangan Desa Wisata Somongari; dan c) intensitas terhadap kebijakan yang terkait dengan preferensi nilai/pemahaman para pelaksana kebijakan terhadap tujuan kebijakan pengembangan Desa Wisata Somongari.

Keberhasilan pada dimensi ini diukur dengan tiga indikator, yaitu:

- a. Adanya respons positif dari para implementor kebijakan.
 - b. Adanya pemahaman yang baik dari para implementor terhadap standar dan sasaran kebijakan pengembangan Desa Wisata Somongari.
 - c. Para implementor memprioritaskan pengembangan Desa Wisata Somongari.
6. **Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik**, dimensi ini akan menilai sejauh mana aspek sosial, ekonomi, dan masyarakat dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Aspek sosial dapat dilihat dari profesi atau pekerjaan masyarakat sekitar. Aspek ekonomi dilihat dari situasi perekonomian masyarakat sekitar, dan aspek kondisi politik dilihat dari perhatian yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Purworejo.

Indikator keberhasilan pada dimensi ini yaitu:

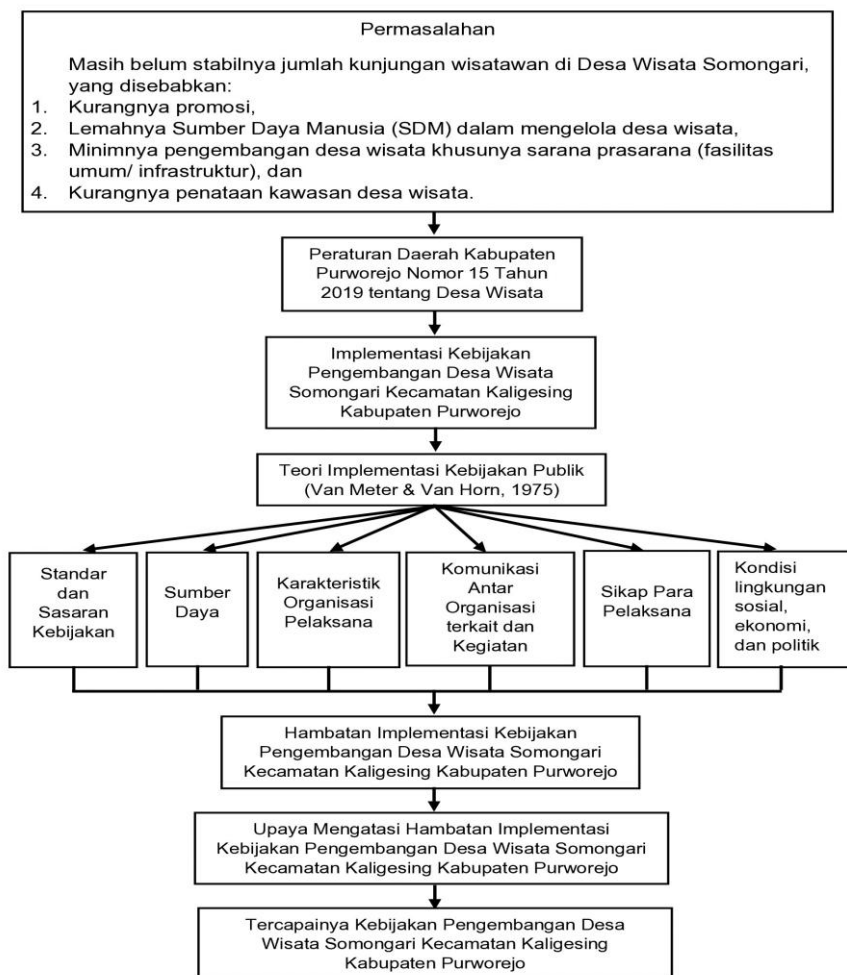
- a. Adanya dukungan dari aspek sosial masyarakat sekitar Desa Wisata Somongari.
- b. Adanya kenaikan pendapatan masyarakat Desa Wisata Somongari.
- c. Adanya perhatian dan dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Somongari.

Landasan legalistik yang digunakan yaitu Perda Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2019 tentang Desa Wisata bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian dan pendayagunaan potensi alam, menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal, dan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Adapun pasal-pasal yang dijadikan pisau analisis dalam penelitian ini yaitu:

1. Pasal 1 ayat (11) yang menjelaskan bahwa desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara, atraksi, akomodasi, fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
2. Pasal 14 yang menjelaskan bahwa pengembangan usaha Pariwisata di Desa Wisata, dilakukan dengan beberapa upaya berupa:
 - a. Usaha daya tarik wisata (pengelolaan pada wisata alam/buatan, wisata sejarah/religi dan pengelolaan wisata budaya).
 - b. Usaha informasi wisata (penyebarluasan informasi desa wisata, penyebarluasan promosi desa wisata dan jasa pramuwisata melalui media cetak maupun media elektronik).
 - c. Usaha atraksi wisata (penyelenggaraan permainan tradisional, pengelolaan sanggar seni dan galeri budaya, penyelenggaraan festival/pameran seni dan budaya, dan penyelenggaraan hiburan rakyat).
 - d. Usaha akomodasi wisata dan kuliner (pembangunan sarana dan prasarana seperti pondok wisata, transportasi, dan telekomunikasi serta pengembangan kuliner lokal).
 - e. Usaha kerajinan rakyat (mengembangkan produk yang dihasilkan masyarakat desa wisata yang dapat berupa cendera mata).
3. Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur kewajiban pemerintah daerah dan pemerintah desa berupa:
 - a. penyediaan informasi dan promosi potensi desa wisata;
 - b. penciptaan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha wisata;
 - c. perlindungan kepemilikan masyarakat atas nilai tradisi dan budaya;
 - d. pemeliharaan, pengembangan, dan pelestarian aset-aset daerah;
 - e. pemberdayaan masyarakat setempat;
 - f. mendorong kemitraan;
 - g. pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan;
 - h. fasilitasi pelatihan SDM; dan
 - i. fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana penunjang pariwisata.

4. Pasal 30 yang menerangkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan desa wisata, pemerintah daerah, pemerintah desa dan/atau pengelola desa wisata dapat melakukan kerja sama.
5. Bentuk kerja sama tersebut diatur dalam pasal 30 ayat (5) yang berupa: bantuan pendidikan dan pelatihan, bantuan sarana dan prasarana, sistem informasi, dan kerja sama lain di bidang pengembangan Desa Wisata.

Untuk lebih jelasnya, kerangka pemikiran di atas dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Diolah peneliti, 2023

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data-data penelitian dikumpulkan melalui *in-depth interview*, observasi nonpartisipan, dan dokumentasi. *In-depth interview* dilakukan terhadap beberapa informan kunci yang ditentukan secara purposif meliputi Kadis Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo, Kabid Destinasi Pariwisata, Kabid Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya dan Ekonomi Kreatif, Sekcam Kaligesing, Kades Somongari, Ketua dan Anggota Pokdarwis, dan Pelaku Usaha di kawasan Desa Somongari. Peneliti juga mewawancarai wisatawan/pengunjung yang ditentukan secara aksidental.

Setelah data dikumpulkan, data kemudian dianalisis menggunakan teori implementasi Van Meter dan Van Horn (1975). Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif dari (Miles dkk., 2014) yakni, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Somongari

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Dimensi ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dan mencegah kesalahpahaman antara pembuat kebijakan dan para pelaksana kebijakan. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Desa Wisata telah dipedomani oleh para pelaksana kebijakan yaitu DINPORAPAR, pemerintah Kecamatan Kaligesing, dan pemerintah Desa Somongari. Namun, belum seluruh pelaksana memahami isi kebijakan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Purworejo juga telah menerbitkan SK Bupati Purworejo Nomor 160.18/764/2022 tentang Penetapan dan Klasifikasi Desa Wisata Kabupaten Purworejo Tahun 2022. Dalam SK ini, DINPORAPAR diwajibkan untuk melaporkan kegiatan pengembangan desa wisata setidaknya satu kali dalam satu tahun. Selain itu, seluruh perangkat daerah di Kabupaten Purworejo diminta untuk mendukung pengembangan desa wisata tersebut.

Beberapa usaha yang telah dilakukan untuk pengembangan usaha pariwisata di Desa Wisata Somongari sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2019 khususnya Pasal 14 yaitu:

1) Usaha Daya Tarik Wisata

Daya tarik wisata di Desa Somongari telah berhasil dikembangkan yang dibuktikan dengan masuknya Desa Somongari ke dalam kategori desa wisata berkembang menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Purwanto, 2022). Selain itu, Festival Budaya Jolenan Somongari meraih penghargaan sebagai warisan budaya tak benda dari Kemendikbud. Desa Somongari juga meraih juara harapan 3 pada Gelar Desa Wisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

2) Usaha Informasi Wisata

Usaha informasi wisata di Desa Somongari sudah cukup baik. Namun, masih diperlukan pelatihan terkait usaha informasi wisata melalui media sosial supaya pengembangan desa wisata selaras dengan perkembangan zaman.

3) Usaha Atraksi Wisata

Pengembangan atraksi wisata sudah berjalan dengan baik. Sudah ada pemahaman dari pemerintah desa dan masyarakat akan potensi pariwisata yang besar berupa kebudayaan dan kesenian. Kolaborasi yang baik juga sudah terjalin antara pemerintah desa dengan DINPORAPAR dalam pelaksanaan Festival Tribute to W.R. Soepratman dan Festival Budaya Jolenan Somongari.

4) Usaha Akomodasi Wisata dan Kuliner

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi usaha pengembangan akomodasi jalan di Kecamatan Kaligesing masih kurang optimal. Selain itu, jaringan internet di Desa Somongari juga masih kurang baik.

5) Usaha Kerajinan Rakyat

Usaha kerajinan rakyat masih perlu pengembangan lebih lanjut pada produk cendera mata yang berfungsi sebagai kenang-kenangan dari suatu tempat wisata.

Dari deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan usaha pariwisata di Desa Somongari sudah berjalan dengan baik. Namun, masih perlu peningkatan pada akomodasi jalan dan usaha kerajinan rakyat. Pengembangan usaha ini juga terlihat dari jumlah peningkatan wisatawan pada tahun 2023 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Data Pengunjung Desa Somongari Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Pengunjung
2021	559
2022	1.134
2023	8.475

Sumber: Hasil pengolahan data riset, 2024

Dari tabel tersebut terlihat bahwa kunjungan pada tahun 2023 meningkat signifikan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah pengunjung ini berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat sekitar dan penyerapan tenaga kerja di Desa Somongari.

Jika ditinjau dari indikator keberhasilan dimensi standar dan sasaran kebijakan, maka dapat dikatakan indikator ini belum sepenuhnya berhasil karena indikator pertama yaitu adanya pemahaman pihak pelaksana belum tercapai. Sebagaimana kutipan wawancara dengan Kabid Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif pada tanggal 9 Januari 2024, yang menyatakan bahwa:

Pihak desa belum membedakan keanggotaan antara pengelola wisata dan anggota pokdarwis. Hal ini menyebabkan kebingungan pihak dinas ketika menerima pengajuan kegiatan atau bantuan, karena tidak dapat memastikan secara langsung apakah itu kewenangan pengelola desa wisata atau pokdarwis.

Begitu juga dengan indikator kedua yaitu kesesuaian program terhadap Perda Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2019 terutama pasal 14, sudah cukup berhasil karena dari lima pelaksanaan usaha pengembangan wisata, tiga di antaranya sudah berjalan dengan baik yaitu usaha daya tarik wisata, usaha informasi wisata, dan usaha atraksi wisata. Untuk menarik wisatawan, salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan memperhatikan fasilitas wisata, fasilitas umum, aksesibilitas/sarana prasarana (Nasution dkk., 2022). Selain itu, usaha informasi wisata melalui media sosial, website, dan media online lainnya merupakan langkah yang efektif saat ini mengingat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia (Lubis dkk., 2020).

Pada indikator yang ketiga mengenai ketercapaian tujuan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Desa Wisata secara umum dapat dikatakan cukup berhasil karena sudah ada kesadaran dari masyarakat Desa Somongari terkait potensi wisata yang dimilikinya yang kemudian dikembangkan dalam usaha pengembangan wisata sebagaimana diamanatkan dalam Perda tersebut.

2. Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara, SDM di DINPORAPAR sudah baik, memiliki keahlian sesuai bidangnya, dan profesional dalam menjalankan tugas. Akan tetapi, SDM di Pokdarwis sebagai pelaksana di lapangan masih belum kompeten dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan pemberian pelatihan untuk meningkatkan kompetensi anggota Pokdarwis dan perlu adanya komitmen yang kuat serta integritas dari anggota Pokdarwis supaya tidak terlalu sering terjadi pergantian anggota.

Dari sisi sumber daya finansial, Pemda Provinsi Jawa Tengah telah mendukung pengembangan desa wisata dengan memberikan bantuan untuk kelestarian kesenian dan budaya lokal. Adapun mayoritas masyarakat desa telah mendukung dengan memberikan kontribusi dana untuk menyelesaikan kegiatan Festival Jolenan Somongari dan acara adat lainnya.

Dari deskripsi di atas, maka dapat dikatakan bahwa dimensi sumber daya pada indikator kompetensi sumber daya belum optimal karena pengelola Desa Wisata Somongari/pokdarwis belum memiliki kompetensi dalam menjalankan pekerjaannya. Sementara ini, dari indikator sumber daya finansial (anggaran) sudah dapat dikatakan baik karena adanya dukungan anggaran dari Pemda Provinsi Jawa Tengah.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian, para pelaksana implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Somongari seluruhnya memiliki komitmen kuat untuk bersinergi dalam mengembangkan Desa Wisata Somongari. Komitmen ini ditunjukkan dalam penyusunan dan pelaksanaan program pengembangan desa wisata dalam program *Calender of Event* Pariwisata Kabupaten Purworejo.

Komitmen yang kuat juga ditunjukkan oleh pemerintahan Kecamatan Kaligesing dari hasil wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Kaligesing pada tanggal 17 Januari 2024, yang menyatakan:

Kami dari pihak kecamatan selalu dilibatkan diskusi oleh pemerintahan desa dan pokdarwis Desa Somongari dalam penyusunan program dan kegiatan sebelum diajukan ke dinas terkait. Festival Tribute to W.R Soepratman dan Festival Jolenan Somongari merupakan hasil dari pelaksanaan diskusi tersebut. Kecamatan mendukung kedua kegiatan tersebut, karena memiliki tujuan untuk pengembangan desa wisata, kelestarian kesenian dan budaya lokal, serta pemberdayaan masyarakat.

Kedua indikator pada dimensi ini sudah dapat dikatakan berhasil karena sudah ada program yang disusun yang melibatkan berbagai elemen pelaksana kebijakan.

4. Komunikasi Antarorganisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana

Sebagai salah satu indikator keberhasilan implementasi kebijakan, terjalannya komunikasi yang baik antar pelaksana kebijakan merupakan suatu keharusan. Dalam implementasi kebijakan pengembangan desa wisata Somongari, komunikasi antara dinas, pemerintah desa, dan Pokdarwis telah berjalan dengan baik. DINPORAPAR berupaya membangun komunikasi dengan para pelaksana kebijakan dan para pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai keberhasilan dalam pengembangan desa wisata Somongari.

Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo pada tanggal 19 Januari 2024 yang mengungkapkan bahwa:

Dinas selalu terbuka untuk berkomunikasi dalam upaya pengembangan desa wisata ini. Dinas berupaya untuk mengalokasikan dana guna pelaksanaan monitoring, forum diskusi serta evaluasi terkait program pengembangan desa wisata dan evaluasi pelaksanaan pengembangan desa wisata serta kegiatan yang dilaksanakan bersama desa wisata.

Komunikasi yang baik juga dibangun oleh pemerintah Kecamatan Kaligesing dengan pemerintah Desa Somongari dan Pokdarwis.

Jika ditinjau dari kedua indikator pada dimensi ini, maka dapat dikatakan dimensi ini telah berjalan dengan baik karena sudah terjalin komunikasi yang baik yang menunjukkan adanya koordinasi dan mekanisme koordinasi yang jelas dalam proses pengembangan Desa Wisata Somongari.

5. Sikap Para Pelaksana

Sikap para pelaksana kebijakan dinilai dari respons atau reaksi yang mereka perlihatkan terkait kebijakan pengembangan Desa Wisata Somongari. Sikap para pelaksana ini dibagi menjadi tiga yaitu:

1) Respons terhadap Implementasi Kebijakan

Respons positif ditunjukkan oleh DINPORAPAR Kabupaten Purworejo yang memberikan dukungan terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan desa wisata. Dukungan dinas berupa pemberian pelatihan pemandu wisata, kuliner, pelatihan *digital marketing*, pengelolaan *homestay*, dan pelatihan manajemen desa wisata.

Selain itu, dinas juga membuat paket perjalanan wisata ke Desa Somongari serta meningkatkan promosi melalui media sosial dan brosur-brosur. Kolaborasi dengan pemerintah desa terlihat dari penyelenggaraan kegiatan Festival Tribute to W.R. Soepratman dan Festival Jolenan Somongari.

Respons positif juga diberikan oleh pemerintah Desa Somongari dengan mengalokasikan Dana Desa untuk kegiatan pengembangan desa wisata. Adanya kontribusi dana dari masyarakat juga merupakan respons positif terhadap implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Somongari.

2) Kemampuan Kognisi

Kemampuan kognisi bertujuan untuk menilai pemahaman para pelaksana kebijakan terhadap implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Somongari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para implementor kebijakan telah memahami mekanisme pengembangan desa wisata.

Para implementor kebijakan pengembangan desa wisata yang terdiri atas DINPORAPAR Kabupaten Purworejo, pemerintah Kecamatan Kaligesing, pemerintah Desa Somongari, dan Pokdarwis Desa Somongari telah memahami Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Desa Wisata beserta berbagai program dan kegiatan pengembangan desa wisatanya.

3) Intensitas Pelaksana Kebijakan

Intensitas pelaksana kebijakan merujuk pada preferensi nilai yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa Kadis Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata memiliki peranan paling penting sebagai inisiator dan penggerak utama dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan Desa Wisata Somongari. Kadis juga memahami bahwa kebijakan tersebut dapat memberikan dampak terhadap peningkatan jumlah wisatawan, kesejahteraan masyarakat, perekonomian, dan Pendapatan Asli Daerah.

Dari paparan ketiga indikator di atas, dapat disimpulkan bahwa dimensi ini telah berjalan dengan baik yang ditandai dengan adanya dukungan dari para implementor kebijakan, para pelaksana kebijakan mendukung pengembangan desa wisata, memahami dengan baik Perda Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Desa Wisata, dan memahami program kegiatan pengembangan desa wisata. Tugas dan tanggung jawab pengembangan desa wisata juga dilaksanakan dengan baik oleh Kepala DINPORAPAR.

6. Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Suksesnya implementasi sebuah kebijakan juga ditentukan oleh kondisi lingkungan sekitar. Indikator ini untuk melihat sejauh mana dukungan lingkungan eksternal terhadap Implementasi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Somongari.

1) Kondisi Lingkungan Sosial

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa adanya keselarasan pada kondisi sosial yang mana masyarakat Desa Somongari mayoritas berprofesi sebagai buruh tani dan petani. Selain itu, masyarakat setempat juga masih menjaga nilai-nilai kearifan budaya lokal. Maka dari itu, pengembangan desa wisata ini dapat dikatakan didukung oleh kondisi lingkungan sosial.

2) Kondisi Ekonomi

Kondisi lingkungan ekonomi masyarakat Desa Somongari masih dikategorikan menengah ke bawah. Namun, pengembangan desa wisata ini telah meyakinkan masyarakat desa bahwa akan meningkatkan taraf perekonomian mereka sehingga dengan kesadaran sendiri mereka turut berpartisipasi dalam proses pengembangan desa wisata ini.

3) Kondisi Politik

Pada lingkungan politik peneliti melihat bahwa kondisi politik dalam implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Somongari mendapatkan dukungan dari pemerintah Kabupaten Purworejo. Dukungan ini diberikan oleh Bupati Kabupaten Purworejo yang menanggapi Perda Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Desa Wisata dengan menetapkan Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/764/2022. Dalam SK tersebut, bupati menginstruksikan dinas terkait dan desa untuk mengembangkan dan membangun pariwisata yang berdaya saing dan memiliki nilai jual sehingga dapat menyejahterakan masyarakat sekitar.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa unsur politik vital daerah meliputi Bupati dan DPRD Kabupaten Purworejo yang sangat mendukung pengembangan Desa Wisata Somongari. Pemerintah Kabupaten Purworejo juga mengikutsertakan Desa Somongari dalam Gelar Desa Wisata Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 dan berhasil meraih juara harapan 3. Dukungan pengembangan desa wisata juga datang dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memberikan bantuan langsung sebesar 100 juta rupiah pada tahun 2021 dan 50 juta rupiah pada tahun 2023.

Dari paparan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dikatakan berhasil dan tidak memiliki kendala yang berarti.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Pengembangan Desa Wisata Somongari

Faktor Pendukung

1. Komitmen yang Baik antar Pelaksana Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Somongari

Dari hasil wawancara dan dokumentasi diperoleh data bahwa Pemerintah Kabupaten Purworejo memiliki komitmen yang kuat dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Purworejo, terutama Desa Wisata. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara bersama Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo pada tanggal 19 Januari 2024, yang menyatakan:

Bupati Purworejo memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung pengembangan Pariwisata, ini dibuktikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) ini merupakan salah satu upaya dalam rangka mendukung program percepatan pengembangan pariwisata dan ekonomi Kreatif di Kabupaten Purworejo dan Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, dinas juga berupaya menyelaraskan dengan membangun komitmen bersama pemerintah desa, Pokdarwis dan masyarakat sebagai ujung tombak pelaksana kebijakan di lapangan. Selain itu, hasil observasi menunjukkan bahwa para pelaksana kebijakan di tingkat pemerintahan desa yakni kepala desa dan ketua Pokdarwis memiliki komitmen yang kuat. Komitmen pemerintahan desa ditunjukkan dengan mengalokasikan dana desa untuk pengembangan desa wisata. Sementara itu, ketua Pokdarwis memiliki komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dengan mengusung konsep pelayanan prima.

Temuan penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dewi dkk., 2019) yang menemukan bahwa peran *stakeholder* masih rendah dalam pengembangan kampung wisata industri kreatif di Surakarta.

2. Komunikasi yang Baik Antar Pelaksana Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Somongari

Para pelaksana kebijakan pengembangan Desa Wisata Somongari melakukan komunikasi dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara bersama Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo pada tanggal 19 Januari 2024, yang menyatakan:

Faktor pendukung pelaksanaan kebijakan tentu saja komunikasi. Dinas melakukan komunikasi dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan desa wisata yang ada. Tak hanya itu kami juga membuka forum diskusi terkait program dan kegiatan pengembangan desa wisata.

Senada dengan pernyataan kepala dinas, Kepala Desa Somongari menyatakan bahwa:

Kami dan Pokdarwis selalu mengkomunikasikan dengan pihak dinas ketika akan ada kegiatan-kegiatan pariwisata di desa. Ini dilakukan dari mulai perencanaan kegiatan, pelaksanaan hingga berakhirnya kegiatan.

Dari wawancara di atas dapat terlihat bahwa terjalin komunikasi yang baik antara dinas dan pemerintah desa. Dinas selalu melibatkan Desa Somongari dalam penyusunan *Calender of Event*, sehingga Festival Tribute to W.R Soepratman dan Festival Jolenan Somongari dapat berjalan dengan baik dari persiapan hingga pelaksanaan kegiatan.

Peneliti menyimpulkan bahwa telah terjalin komunikasi yang baik antar pelaksana kebijakan pengembangan Desa Wisata Somongari. Hal ini menandakan bahwa komunikasi merupakan faktor pendukung yang penting dalam pengembangan desa wisata. Dikarenakan pengembangan desa wisata tidak dapat dilakukan sendiri, diperlukan adanya komunikasi antar pelaksana kebijakan untuk mencapai keberhasilan.

Hasil penelitian ini selaras dengan temuan penelitian (Anggraini dkk., 2023) yaitu bahwa kerja sama yang baik antara pemerintah desa dan Pokdarwis dapat saling melengkapi untuk pengembangan desa wisata lebih lanjut.

3. Tingginya Kesadaran Masyarakat Desa Somongari terkait Pengembangan Desa Wisata

Kesadaran masyarakat menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Somongari. Tingginya tingkat kesadaran masyarakat Desa Somongari terhadap pengembangan desa wisata, salah satunya ditunjukkan dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama Ibu Wartiyani pada tanggal 18 Januari 2024, beliau menyatakan bahwa:

Masyarakat disini masih sangat mempertahankan nilai-nilai leluhur. Warga memiliki semangat gotong royong dengan melakukan pembersihan desa setiap minggu. Setiap dusun di Desa Somongari juga memiliki kesenian lokal yang terus dilestarikan warganya. Warga disini juga tetap melaksanakan tradisi dan berbagai upacara adat. Ini semua dilakukan warga untuk menjaga segala kearifan lokal yang mereka miliki, terlebih hal tersebut dijadikan sebagai ciri khas khusus yang di miliki Desa Somongari, sehingga diharapkan dapat menarik wisatawan untuk berkunjung.

Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa kesadaran yang tinggi dimiliki masyarakat Desa Somongari dalam pengembangan desa wisata. Dengan demikian, kesadaran masyarakat termasuk pilar yang mendukung keberhasilan implementasi keberhasilan kebijakan pengembangan Desa Wisata Somongari.

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Widiastuti & Nurhayati, 2019) yang menemukan bahwa salah satu faktor pendukung pengembangan desa wisata adalah faktor eksternal berupa kesadaran dan kemauan masyarakat.

Faktor Penghambat

1. Kurangnya Pemahaman Pelaksana Kebijakan

Kurangnya pemahaman pelaksana kebijakan adalah kurangnya pemahaman pemerintah desa dan Pokdarwis Desa Somongari terkait keanggotaan Pokdarwis dan pengelola Desa Wisata Somongari serta hak, kewajiban dan larangan pengelola desa wisata sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Desa Wisata. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara bersama Bapak Agung Pranoto,

S.Sos selaku Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tanggal 9 Januari 2024, yang menyatakan bahwa:

Pihak desa belum membedakan keanggotaan antara pengelola wisata dan anggota Pokdarwis. Hal ini menyebabkan kebingungan pihak dinas ketika menerima pengajuan kegiatan atau bantuan, karena tidak dapat memastikan secara langsung apakah itu kewenangan pengelola desa wisata atau Pokdarwis.

Hal ini juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ibu Partini selaku anggota Pokdarwis pada tanggal 18 Januari 2024 yang menyatakan:

Anggota Pokdarwis disini ya pengelola Desa Wisata Somongari, sehingga mereka mengemban kedua tugas tersebut ketika kegiatan pariwisata.

Hasil penelitian terdahulu juga menemukan bahwa sumber daya yang terbatas dan kurangnya pengetahuan dalam menerapkan kebijakan desa wisata adalah penyebab organisasi pelaksana tidak mampu menerapkan kebijakan desa wisata (Areros dkk., 2022).

2. Belum Kompetennya Sumber Daya Pokdarwis

Belum memadai dan berkompetennya sumber daya Pokdarwis ini, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hari Purwanto selaku Ketua Pokdarwis Desa Somongari pada tanggal 12 Januari 2024, yang menyatakan:

Sumber daya manusia yang dimiliki Pokdarwis Desa Somongari masih belum memadai dan kurang berkompeten. Belum memadai di sini karena Pokdarwis hanya merekrut pemuda yang ada dan berkeinginan membantu pengembangan desa wisata. Oleh karena itu, dalam merekrut anggota Pokdarwis belum melihat dari kompetensi dan profesionalisme yang dimiliki.

Dari wawancara di atas diketahui bahwa belum memadainya jumlah anggota Pokdarwis hanya merekrut pemuda yang ada dan berkeinginan membantu pengembangan desa wisata. Hal ini, disebabkan karena anggota Pokdarwis yang pergi dari desanya untuk merantau setelah menamatkan pendidikan SMA/SMK maupun sarjana. Selain dari segi jumlah anggota ini juga berdampak terhadap kualitas anggota Pokdarwis.

Sementara itu, belum berkompetennya anggota pokdarwis terkait penguasaan teknologi informasi juga diungkapkan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo. Beliau mengungkapkan pada wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Januari 2024, bahwa:

Menurut saya, kami masih kekurangan tenaga ahli dalam penguasaan IT sehingga promosi yang dilakukan di media sosial masih terkesan monoton dan masih dalam skala kecil yakni hanya melalui Instagram, Youtube dan Story WhatsApp.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti pada akun Instagram Desa Wisata Somongari, menunjukkan bahwa keahlian yang dimiliki anggota Pokdarwis Desa Wisata Somongari dalam mengelola media sosial masih kurang. Promosi yang dilakukan pada akun Instagram masih jarang atau dapat dikatakan belum terlalu aktif, sehingga belum dapat menjangkau banyak orang. Selain itu, postingan yang ada hanya postingan kegiatan yang akan atau sudah dilaksanakan, sehingga kurang mengenalkan dan mempromosikan Desa Wisata Somongari.

Hasil penelitian ini selaras dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh (Widiastuti & Nurhayati, 2019) yang menemukan bahwa salah satu faktor penghambat pengembangan desa wisata adalah keterbatasan SDM.

Hal ini sangat disayangkan mengingat peran vital yang dimiliki Pokdarwis sebagai subjek atau aktor penting pengembangan desa wisata yang diharapkan dapat membantu mengeksplorasi dan mengoptimalkan berbagai potensi wisata yang ada di desa (Utami dkk., 2019).

3. Belum Optimalnya Pengelolaan Dana Desa dan Minimnya Dukungan Anggaran untuk Pembangunan Fasilitas Penunjang

Belum optimalnya pengelolaan dana desa ini terlihat dari hasil wawancara serta observasi yang dilakukan oleh peneliti. Hal ini dibuktikan dengan wawancara dengan pengunjung Ibu Sri Wulandari pada tanggal 20 Januari 2024, yang menyatakan:

Saya sangat senang berwisata ke Desa Somongari karena disini warganya sangat ramah serta kelestarian alamnya masih terjaga. Selain berburu durian, saya juga mengunjungi tempat bersejarah yakni kediaman W.R Soepratman dan wisata Alam Curug Silangit. Namun, saya menyayangkan masih kurangnya fasilitas penunjang seperti kondisi jalan yang kurang baik ketika menuju Curug Silangit, tidak adanya toilet umum dan tempat parkir.

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa masih belum optimalnya pembangunan di Desa Somongari sehingga terdapat jalan yang masih kurang baik serta belum adanya pos jaga, toilet umum dan tempat parkir.

Minimnya dukungan anggaran selain dana desa di ungkapkan oleh Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo pada tanggal 19 Januari 2024, yang menyatakan bahwa:

Selain dari pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan maupun desa dalam pengembangan Desa Somongari juga memerlukan kerjasama dengan pihak swasta (investor) untuk membantu pembangunan fasilitas penunjang pariwisata.

Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya finansial sangat diperlukan dalam menunjang keberhasilan pengembangan desa wisata. Oleh karena itu, tidak hanya peran dari pemerintah dan masyarakat tetapi juga memerlukan peran dari swasta.

Temuan penelitian ini selaras dengan temuan penelitian (Dewi dkk., 2019) bahwa ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang minim menjadi penghambat dalam pengembangan industri wisata.

C. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Implementasi Pengembangan Desa Wisata Somongari

Dalam mengatasi faktor penghambat implementasi pengembangan Desa Wisata Somongari dibutuhkan tindakan khusus yang harus dilakukan oleh para pelaksana kebijakan untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Berikut adalah upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat tersebut:

1. Melaksanakan Sosialisasi Perda Nomor 15 Tahun 2019 dan Perbaikan Struktur dan Birokrasi

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo berupaya untuk memberikan pemahaman terkait pengembangan desa wisata berdasarkan peraturan daerah yang telah ditetapkan, agar pelaksanaan implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sementara itu, Kepala Desa Somongari berupaya untuk memperbaiki struktur dan birokrasi dalam keanggotaan Pokdarwis dan pengelola desa wisata, agar para pelaksanaan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

2. Melakukan Seleksi Anggota Pokdarwis

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pokdarwis pada tanggal 12 Januari 2024 menyatakan bahwa:

Ke depannya kami akan merekrut anggota yang berkompeten serta profesional. Tidak hanya itu, ke depannya kami juga akan mempersiapkan regenerasi anggota lebih awal jika akan ada pergantian anggota.

Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa ketua Pokdarwis memiliki komitmen untuk memperbaiki keanggotaan Pokdarwis. Hal ini dilakukan guna menciptakan lingkungan kerja yang baik serta meningkatkan kinerja Pokdarwis dalam pengembangan Desa Wisata Somongari.

3. Memberikan Pelatihan IT

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia terkait penggunaan teknologi informasi (IT), khususnya dalam penggunaan media sosial sebagai sarana promosi. Hal ini disadari beliau karena kebutuhan akan penguasaan IT sangat penting di era digital saat ini. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan (Masitah, 2019) bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan pengembangan desa wisata adalah dengan mengadakan pelatihan bagi pelaku dan pengelola objek wisata sehingga mampu melaksanakan pengelolaan dan pengembangan desa wisata.

4. Melakukan Promosi untuk Menarik Investor guna Pembangunan Fasilitas Penunjang

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo telah memahami bahwa Kabupaten Purworejo memiliki potensi pariwisata besar. Hal ini juga didukung oleh letaknya di kawasan strategis nasional karena berdekatan dengan Yogyakarta *International Airport*, kawasan Daerah Otorita Borobudur dan Bendungan Bener. Kondisi ini harus dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memperoleh sumber dana tambahan dari pihak swasta atau investor, guna pembangunan fasilitas penunjang desa wisata.

5. Mengadakan Gelar Pokdarwis Kabupaten Purworejo

Berikut adalah bentuk dokumentasi dari pelaksanaan Gelar Pokdarwis Kabupaten Purworejo Tahun 2023:

Gambar 2. Gelar Pokdarwis Kabupaten Purworejo Tahun 2023



Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo, 2024

Gambar di atas adalah pelaksanaan Gelar Pokdarwis Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini bertujuan agar Pokdarwis yang ada di Kabupaten Purworejo terus berinovasi dalam pengembangan desa wisata. Pokdarwis yang berhasil mengembangkan desa wisata dengan baik akan mendapatkan penghargaan, sehingga diharapkan semua Pokdarwis akan berlomba-lomba dalam menciptakan inovasi dalam pengembangan desa wisata.

SIMPULAN

Implementasi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Somongari

Implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Somongari secara umum telah berjalan dengan baik. Dari enam dimensi implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) yang dianalisis, empat dimensi sudah dikategorikan baik, yaitu dimensi karakteristik organisasi pelaksana, dimensi komunikasi antarorganisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana, dimensi sikap pelaksana, dan dimensi kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Keberhasilan implementasi kebijakan pada keempat dimensi ini perlu dipertahankan.

Adapun dua dimensi lainnya yang belum baik pada implementasinya yaitu dimensi standar dan sasaran kebijakan dan dimensi sumber daya. Untuk kedua dimensi ini perlu perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Purworejo mengingat kedua dimensi ini krusial karena berhubungan dengan bagaimana suatu kebijakan dipahami dengan baik oleh seluruh implementornya dan berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten untuk melaksanakan suatu kebijakan.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Somongari

Faktor pendukung implementasi kebijakan ini yaitu adanya komitmen yang baik antarpelaksana kebijakan, komunikasi yang efektif, dan tingginya kesadaran masyarakat Desa Somongari terkait pengembangan desa wisata.

Adapun yang menjadi faktor penghambatnya yaitu masih kurangnya pemahaman pelaksana terhadap isi kebijakan, masih belum memadai dan kompetennya sumber daya Pokdarwis setempat, dan belum optimalnya pengelolaan Dana Desa serta minimnya dukungan anggaran.

Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Somongari

Untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, perlu dilakukan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Desa Wisata, perbaikan struktur dan birokrasi antara pengelola wisata dan Pokdarwis, memilih anggota Pokdarwis yang memiliki integritas dan loyalitas untuk mengembangkan desa wisata, pembekalan dan pelatihan IT bagi pengelola wisata, melakukan promosi yang lebih masif untuk menarik investor, dan mengadakan Gelar Pokdarwis Kabupaten Purworejo.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Anggraini, F. S. S., Ati, N. U., & Ilyas, T. R. (2023). Implementasi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat: (Studi tentang Objek Wisata Jamun Spot Sunset Desa Poncokusumo Kabupaten Malang). *Jurnal Respon Publik*, 17(6), 39–49.
- Areros, W. A., Lengkong, F. D. J., & Londa, V. Y. (2022). Implementation of Tourism Village Policy in South Minahasa Regency. *Journal of Asian Multicultural Research for Social Sciences Study*, 3(3), 64–71. <https://doi.org/10.47616/jamrsss.v3i3.304>
- BPS. (2024). *Jumlah Devisa Sektor Pariwisata (Miliar US \$), 2021-2022*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE2MCMY/jumlah-devisa-sektor-pariwisata.html>
- Dewi, D. S. K., Astuti, W., & Mukaromah, H. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Jayengan Kampoeng Permata sebagai Kampung Wisata Industri Kreatif. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 14(1), 37–51.
- Gartiwi, M. M., Irawati, R. I., & Karlina, N. (2022). Implementasi Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah Kabupaten Pangandaran. *Responsive*, 5(2), 69–79. <https://doi.org/10.24198/responsive.v5i2.41126>
- Hilman, Y. A., & Putri, R. H. N. (2022). Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Destinasi Wisata “Sawah Lungguh” Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Bareng Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(1), 12–22. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i1.2496>
- Ira, W. S., & Muhamad, M. (2020). Partisipasi Masyarakat pada Penerapan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan (Studi Kasus Desa Wisata Pujon Kidul, Kabupaten Malang). *Jurnal Pariwisata Terapan*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.22146/jpt.43802>
- Krisnawati, I. (2021). Program Pengembangan Desa Wisata Sebagai Wujud Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pasca Covid dan Implementasinya (Sebuah Studi Literatur). *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(2), 211–221.
- Kristian, Y. (2021). Pengelolaan Objek Wisata Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat Di Danau Aco Kampung Linggang Melapeh Kecamatan Linggang Bigung. *Administrasi Negara*, 5(1), 5404–5417.
- Lubis, H., Rohmatillah, N., & Rahmatina, D. (2020). Strategy of Tourism Village Development Based on Local Wisdom. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 9(2), 320–329. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v9i2.22385>
- Masitah, I. (2019). Pengembangan Desa Wisata Oleh Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(3), 45–56.

- Maulidiah, N., & Megawati, S. (2022). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pengembangan Desa Wisata: Studi Pada BUMDES Sambimadu , Desa Sambibulu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. *Journal Publika*, 10(2), 391–406. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p391-406>
- Mebri, F. H., Suradinata, E., & Kusworo, K. (2022). Internal Tourism Development Strategy Increasing Regional Original Income (PAD) in Jayapura City Papua Province. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(1), 102–114. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i1.2537>
- Mellu, M. R., Bessie, J. L. D., & Bunga, T. T. (2018). Analisis Faktor Penunjang Dan Penghambat Pengembangan Objek Wisata: (Studi Pada Objek Wisata Alam Bola Palelo, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan). *Journal of Management - Small Medium Enterprises (SME's)*, 7(2), 269–286.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (3 ed.). SAGE Publications, Inc.
- Purwanto, H. (2022). *Desa Wisata Somongari*. kemenparekraf.go.id
- Santoso, E. B., Arwanto, A., Karina, R. N., Hazmi, A. R., & Rahmadanita, A. (2023). Pengembangan Objek Wisata Nagari Tuo Pariangan Di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 13(2), 178–199. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v13i2.3763>
- Utami, M. M., Taufik, H. E. R., & Bhakti, W. N. (2019). *Village Tourism: The Implementation of Community-Based Tourism*. 537–542. <https://doi.org/10.2991/icoi-19.2019.94>
- Widiastuti, A., & Nurhayati, A. S. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Desa Wisata Nganggring Sleman. *Jurnal Ilmiah WUNY*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.21831/jwuny.v1i1.26852>
- Wirdayanti, A., Asri, A., Anggono, B. D., Hartoyo, D. R., Indarti, E., Gautama, H., S. H. E., Harefa, K., Minsia, M., Rumayar, M., Indrijatiningrum, M., Susanti, T., & Ariani, V. (2021). *Pedoman Desa Wisata*. <https://www.ciptadesa.com/2021/06/pedoman-desawisata.html>
- Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2019 tentang Desa Wisata
- Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penetapan Klasifikasi Desa Wisata Kabupaten Purworejo